

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM 2013 DI SMA KESATRIAN 1 KOTA SEMARANG

Oleh :

Dewi Mayangsari, R Slamet Santoso

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Untuk memajukan mutu pendidikan, Pemerintah merumuskan kebijakan dalam pembaharuan kurikulum yaitu kurikulum 2013 dengan tujuan menghasilkan insan Indonesia yang: produktif, kreatif, inovatif, afektif; melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Kurikulum ini merupakan kurikulum baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum 2013 sendiri merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pada pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter, dimana siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam proses berdiskusi dan presentasi serta memiliki sopan santun dan sikap disiplin yang tinggi. Kurikulum ini secara resmi menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang sudah diterapkan sejak 2006 lalu. Kurikulum ini pun mempunyai kelemahan dan keunggulan.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan kurikulum 2013 ini dinilai sudah tepat. Namun masih ditemukan adanya permasalahan terkait dengan perubahan KTSP 2006 ke kebijakan kurikulum 2013 di SMA Kesatrian 1 Semarang antara lain kendala fasilitas yang dalam jumlah masih kurang kemudian kesiapan pelaksana yang masih menggunakan metode lama saat mengajar dan banyak kelas kosong yang muridnya tidak diberi tugas pengganti.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMA Kesatrian 1 kota Semarang sudah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal. Dibalik komunikasi yang terjalin dengan baik dari antar pihak, masih ada sikap pelaksana yang kurang tepat saat ada kepentingan lain diluar jam mengajar dan fasilitas internet yang kurang cepat. Saran dari peneliti adalah pihak sekolah lebih memperketat aturan tidak hanya untuk siswa melainkan guru dan menambah fasilitas wifi di sekolah.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Di SMA Kesatrian 1 Kota Semarang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan Tujuan Nasional.

Dalam proses pembangunan tersebut peranan pendidikan amatlah strategis. Pendidikan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan multiplier effect terhadap pembangunan perekonomian.

Pendidikan merupakan unsur utama dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Pertama kali kita dikenalkan oleh pendidikan formal di sekolah, sekolah adalah lembaga yang meletakkan dasar perkembangan anak

dengan pendidikan, Indonesia dapat memajukan generasi penerus sebagai ujung tombak dimasa depan. Meningkatkan sumber daya manusia diawali dari tingkat pendidikan. Pengelolaan pendidikan harus berorientasi kepada bagaimana menciptakan perubahan yang lebih baik. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya masyarakat madani sebagai bangsa dan masyarakat Indonesia baru dengan tatanan kehidupan yang sesuai dengan amanat proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proses pendidikan.

Pemerintah merumuskan kebijakan dalam pembaharuan kurikulum yaitu kurikulum 2013 dengan tujuan menghasilkan insan Indonesia yang: produktif, kreatif, inovatif, afektif; melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi.

Kurikulum 2013 adalah sering disebut juga dengan kurikulum berbasis karakter. Kurikulum ini merupakan kurikulum baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum 2013 sendiri merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pada pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter, dimana siswa

dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam proses berdiskusi dan presentasi serta memiliki sopan santun dan sikap disiplin yang tinggi. Kurikulum ini secara resmi menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang sudah diterapkan sejak 2006 lalu. bukan hanya itu, Kurikulum ini pun mempunyai kelemahan dan keunggulan. Dalam Kurikulum 2013 tersebut, mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik pada satu satuan pendidikan pada setiap satuan atau pun jenjang pendidikan. Sementara untuk mata pelajaran pilihan yang diikuti oleh peserta didik, dipilih sesuai dengan pilihan dari mereka. Kedua kelompok mata pelajaran bersangkutan (wajib dan pilihan) terutamanya dikembangkan dalam struktur kurikulum pendidikan tingkat menengah yakni SMA.

Dengan adanya kebijakan baru yaitu kurikulum 2013, Dinas Pendidikan

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 di SMA Kesatrian 1 Kota Semarang yaitu :

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan kurikulum 2013 berjalan di SMA Kesatrian 1 Semarang

Kota Semarang menunjuk SMA Kesatrian 1 untuk melanjutkan kurikulum 2013 sebagai pedoman dalam pembelajaran untuk seterusnya dengan alasan sekolah tersebut telah melaksanakan kebijakan tersebut selama tiga semester, alasan lainnya SMA Kesatrian 1 dianggap mampu memenuhi fasilitas belajar dan mengajar sesuai standard kebijakan tersebut dan satu-satunya sekolah swasta yang dijadikan sekolah percontohan. Karena tidak semua sekolah menggunakan kurikulum 2013 sebagai pedoman mengajar dengan berbagai alasan diantaranya kemampuan guru dan fasilitas yang tersedia. Kurikulum 2013 akan terlaksana, tepat atau tidak, merata atau hanya di kota saja, semua tergantung kepentingan pemerintah terhadap pendidikan kita. Kurikulum 2013 akan berhenti dan ditiadakan jika tidak disosialisasikan sampai ke pelosok oleh pihak berwenang seperti KTSP.

2. Mencari faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMA Kesatrian 1 Semarang

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah administrasi public, kebijakan publik, implementasi kebijakan.

Menurut Gerald Caiden (1982) Adminisrasi negara melingkupi segala

kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan publik atau kebutuhan publik. Ruang lingkup administrasi adalah bagaimana orang mengorganisir diri mereka sebagai publik secara kolektif dan dengan tugas dan kewajiban masing-masing memecahkan masalah publik untuk mencapai tujuan bersama.

Nicolas Henry dalam Harbani Pasolong (2007:27-32), mengemukakan lima paradigma administrasi publik, yaitu:

- a. Paradigma pertama, Prinsip-prinsip administrasi negara (1923-1937).
- b. Paradigma kedua, Paradigma dikotomi antara politik dan administrasi (1900-1926).
- c. Paradigma ketiga, administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970).
- d. Paradigma keempat, administrasi negara sebagai ilmu administrasi (1954-1970)
- e. Paradigma kelima, administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara.

Carl J. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan.

James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Pengertian kebijakan akan lebih mudah dipahami dalam contoh seperti:

1. tujuan: mengatasi kemiskinan;
2. strategi: program pengelolaan raskin;
3. sumber usulan: Pemerintah;
4. penyediaan input:
 - a. peraturan-peraturan,
 - b. dana,
 - c. pembentukan kelompok sasaran,
 - d. perangkat pelaksana bulog, dan lain-lain.

Parsons (2005: x-xi) telah mengumpulkan beberapa pengertian kebijakan publik, yaitu: 1) sebagai publik dan problem-problemnya; 2) studi tentang bagaimana, mengapa dan apa efek dari tindakan aktif dan pasif pemerintah; 3) studi tentang apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut; 4) studi sifat, sebab, dan akibat dari kebijakan publik.

D. Fenomena Penelitian

1. Implementasi Kebijakan, gejala implementasi kebijakan adalah :

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari:

- a. Sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan?
- b. Bagaimana kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan?
- c. Bagaimana kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan?

2. Ketepatan Pelaksanaan

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*). Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli, seperti kartu identitas penduduk, atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan keamanan, sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama

masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola, atau di mana pemerintah tidak efektif menyelenggarakannya sendiri, seperti pembangunan industri-industri berskala menengah dan kecil yang tidak strategis, sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.

3. Ketepatan Target

Ketepatan berkenaan dengan tiga hal, yaitu:

- a. Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain.
- b. Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak.
- c. Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya

mengulang kebijakan yang lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya.

4. Ketepatan Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu:

(a) Lingkungan Kebijakan

Yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. Donald J. Calista menyebutnya sebagai variabel endogen, yaitu *authoritative arrangement* yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, *implementation setting* yang berkenaan dengan posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan.

(b) Lingkungan Eksternal Kebijakan

Lingkungan ini oleh Calista disebut sebagai variabel eksogen, yang terdiri dari atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan *individuals*, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

5. Ketepatan Proses

Terdiri atas tiga proses yaitu;

- a. Menerima Kebijakan, publik memahami kebijakan sebagai aturan dan pemerintah memahaminya sebagai tugas yang harus dilaksanakan
- b. Mengadopsi Kebijakan, publik menerima kebijakan

sebagai aturan dan pemerintah menerimanya sebagai tugas yang harus dilaksanakan

- c. Siap dengan strategi, publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, dan birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan

2. Aspek penghambat keberhasilan kebijakan

a. Komunikasi, gejala Komunikasi yaitu :

- 1) Kelancaran proses transmisi dari implementor kepada masyarakat penerima bantuan, dapat diukur dengan :

- a. Intensitas pertemuan antara aparatur pelaksana dan penerima program
- b. Media yang digunakan dalam proses komunikasi

- 2) Pemahaman masyarakat, dapat diukur dengan :

- a. Tingkat sosialisasi
- b. Informasi yang diterima

b. Sumber Daya, gejala sumber daya :

- 1) Tingkat ketersediaan Sumber daya manusia, dapat diukur dengan :

- a. Kemampuan sumber daya manusia
- b. Kecukupan jumlah sumber

daya manusia

- 2) Tingkat ketersediaan Sumber daya non manusia, dapat diukur dengan :

- a. Ketersediaan dana yang akan diimplementasikan
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana

c. Standar dan Sasaran ,gejala standar dan sasaran :

- 1) Manfaat yang diperoleh dari kebijakan, dapat diukur dengan :

- a. Kebijakan dapat memenuhi kebutuhan

- 2) Standar pelaksanaan kebijakan, dapat diukur dengan :

- a. Aturan dalam menjalankan program

d. Sikap, gejala Sikap:

- 1) Konsistensi Implementor, dapat diukur dengan :

- a. Kemampuan pegawai dalam bekerja di lapangan
- b. Kendala selama implementasi

e. Struktur Organisasi:

- a. Jelas terstruktur siapa yang merumuskan kebijakan hingga kebijakan tersebut harus diimplementasikan oleh siapa

f. Lingkungan, dapat diukur dengan:

- a. Seberapa besar dukungan dari lingkungan sekitar terhadap berhasilnya kebijakan

tersebut

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan desain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMA Kesatrian 1 Kota Semarang.

Subyek penelitian menggunakan purposive dengan mencari informasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, pihak sekolah SMA Kesatrian 1

Cara Pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi yang dilakukan peneliti, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka.

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Marshall dan Rossman. Dalam menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan (Marshall dan Rossman dalam Kabalmay, 2002), diantaranya :

- a. Mengorganisasikan Data
- b. Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan pola jawaban
- c. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada terhadap Data

d. Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data

e. Menulis Hasil Penelitian

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan

1. Ketepatan kebijakan

Perubahan kurikulum ini menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dimana siswa sudah terbiasa dengan menggunakan alat elektronik seperti tablet dan laptop yang terkoneksi dengan internet untuk mencari informasi. Kemajuan teknologi ini perlu disikapi dengan perubahan metode belajar yang mampu mengakomodasi kemajuan teknologi tersebut.

Perkembangan dunia pendidikan tak dapat dipisahkan dengan pesatnya kemajuan teknologi. Melalui kemajuan tersebut, siswa diharap lebih mudah dalam belajar. Untuk itu teknologi dan pendidikan yang bersinergi adalah hal yang ditekankan dalam Kurikulum 2013 agar dapat membuat siswa menjadi inovatif dan lebih kreatif.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Masih banyaknya permasalahan terkait dengan perubahan kurikulum 2006 ke 2013 antara lain kesiapan guru dan siswa, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dari sekolah, ketersediaan buku dan tidak ada uji coba pada sekolah tertentu pada awal pelaksanaan. Hal ini membuat pelaksanaan kurikulum 2013 dengan penundaan penggunaan kurikulum 2013 untuk semua sekolah dan

memfokuskan pada sekolah yang dinilai sudah siap, menurut narasumber sudah tepat.

3. Ketepatan Target

Target dalam kebijakan ini adalah seluruh siswa dengan tujuan menjadikan penerus bangsa yang berkualitas dan memiliki daya saing yang kuat. Indikator ini sudah dinilai tepat karena target dalam keadaan siap dan tidak diintervensi.

4. Ketepatan Lingkungan

Kurikulum 2013 yang telah diuji cobakan saat ini pada beberapa sekolah, salah satunya adalah pada SMA Kesatrian 1 Semarang. Kendala secara internal yang dihadapi guru adalah sistem penilaian dan administrasi yang dinilai terlalu rumit secara administratif. Adanya masalah ini membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Hasil dari adanya peraturan menteri ini adalah penilaian saat ini telah disederhanakan sehingga tidak membebani guru secara administratif.

5. Ketepatan Proses

Ketepatan proses dalam implementasi kebijakan Kurikulum 2013 adalah ketepatan cara yang semestinya diimplementasikan telah dijalankan sesuai aturan yang ada baik dari pemahaman tugas yang diemban oleh birokrat dari atas ataupun bawah.

Sekolah dan guru merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan dan penyampaian kurikulum 2013 kepada siswanya. Dinas Pendidikan Kota juga memiliki peran untuk membantu, membimbing guru, memberikan pelatihan dan pelayanan bila guru maupun sekolah menghadapi masalah dalam proses pelaksanaan kurikulum 2013.

B. Faktor Penentu implementasi kebijakan

1) Komunikasi

Sosialisasi kebijakan implementasi kurikulum 2013 dilakukan pengarahannya dari Pemerintah pusat yang mengundang perwakilan Dinas Pendidikan Kota/Provinsi di seluruh Indonesia dengan mengadakan pertemuan di Jakarta. Setelah itu Dinas Pendidikan mensosialisasikan kebijakan tersebut pada UPTD dan sekolah-sekolah di bawah naungannya.

2) Sumber daya

Sumberdaya manusia tidak menjadi masalah dalam proses pelaksanaan kebijakan, sumberdaya fisik yaitu

kapasitas internet yang dirasa kurang cepat bisa menghambat proses belajar siswa dalam mencari materi tambahan kemudian terdapat di beberapa kelas pendingin ruangan yang tidak beroperasi sehingga konsentrasi siswa dalam belajar sedikit terganggu, suasana kelas tidak kondusif akibat suhu kelas yang panas.

3) Standar dan Sasaran

SMA Kesatrian 1 memiliki standar sesuai dengan kebijakan yang dijalankan, pelatihan yang diberikan untuk guru dalam pemahaman kurikulum 2013 juga sudah terlaksana, bantuan buku paket juga

4) Sikap

Implementor kurang bertanggung jawab dalam menjalankan program sehingga masih ada kendala-kendala yang muncul dari dalam SKPD terkait, yaitu koordinasi pertemuan antar SKPD yang sangat kurang mengakibatkan ada batuan yang sama dalam skpd yang berbeda.

5) Struktur organisasi

Perumus kebijakan yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan-Pengawas Dinas Pendidikan-Sasaran SMA Kesatrian 1

6) Lingkungan

Pemberlakuan kurikulum 2013 ini mengundang pro kontra dan diberitakan dalam porsi berlebihan dalam berbagai media. Hal ini seringkali membuat orang tua yang belum cukup paham dengan kurikulum 2013 menjadi khawatir dan melakukan penolakan. Namun tidak sedikit pula orangtua yang paham dengan adanya kurikulum ini karena disesuaikan dengan kondisi pelajar saat ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketepatan Kebijakan

a. Implementasi kebijakan kurikulum 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, ada pula Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 160 tahun 2014 tentang pelaksanaan kurikulum 2013. Pembuatan kebijakan ini telah tepat dirumuskan guna menjadikan penerus bangsa yang berkualitas dan mampu bersaing dalam pendidikan khususnya siswa di SMA Kesatrian 1 Semarang

b. Kebijakan tersebut dirumuskan memang untuk memecahkan

masalah yang sedang dihadapi, melihat banyak pelajar saat ini lebih dekat dengan gadget dibanding buku pelajaran maka dibuatlah metode pembelajaran baru yang tidak membuat siswa jenuh namun tetap fokus dalam belajar.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Aktor-aktor telah ditentukan secara tepat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Aktor implementasi kurikulum 2013 adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai pengawas berjalannya kurikulum dan guru di SMA Kesatrian 1 sebagai pelaksana kebijakan tersebut dalam kegiatannya belajar mengajar.

3. Ketepatan Target

Dalam implementasi kebijakan ini target sudah tepat yaitu siswa, dalam pelaksanaannya sendiri ada siswa yang lebih senang dengan proses belajar dengan suasana baru dengan menonjolkan keaktifan siswa.

4. Ketepatan Lingkungan

Lingkungan sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan karena dukungan datang dari lingkungan sekitar tetapi implementasi dapat terganggu jika lingkungan tersebut

tidak memberikan dukungan seperti berita yang disiarkan di televisi bahwa kebijakan kurikulum 2013 akan dihapus dan memberikan komentar buruk tentang isi kebijakan kurikulum 2013. Hal ini menimbulkan kebingungan pada siswa kurikulum mana yang akan digunakan untuk pedoman belajar di sekolah.

5. Ketepatan Proses

Ketepatan proses melihat bagaimana kegiatan dalam menjalankan kebijakan tersebut telah sesuai dengan prosedur atau belum. Di SMA Kesatrian 1 Semarang masih terlihat beberapa kendala dalam belajar mengajar salah satunya guru masih menggunakan metode kurikulum lama belum sepenuhnya menguasai mengajar dengan cara kurikulum 2013.

6. Komunikasi

Komunikasi yang terjalin antara Pemerintah pusat dengan Dinas terkait sudah sangat jelas, begitu juga pihak Dinas menginformasikan kepada sekolah dan UPTD yang dibawahinya apa saja yang akan dilaksanakan dalam pencapaian tujuan kebijakan kurikulum 2013. Dikatakan komunikasi sudah menjadi faktor

pendorong berjalannya kurikulum 2013.

7. Sumberdaya

Jumlah tenaga pengajar di SMA Kesatrian 1 tidak ditemukan masalah karena semua guru sudah melakukan tugas sesuai kewajibannya, yang menjadi masalah adalah sumberdaya fisik atau fasilitas karena masih ada beberapa yang harus dibenahi dan ditambahi seperti kecepatan internet (wifi) yang tersedia di lingkungan sekolah dikeluhkan oleh siswa yang dirasa kecepatannya krang sehingga mereka sedikit terganggu dalam mencari materi pembelajaran. Selanjutnya pendingin ruang kelas beberapa tidak beroperasi atau rusak sehingga mengganggu konsentrasi belajar siswa karena ruang kelas tidak kondusif karena suhu yang panas.

8. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana dari birokrat maupun implementor memiliki tanggung jawab atas tercapainya tujuan kebijakan tersebut. Dinas Pendidikan Kota Semarang siap membantu jika sekolah mendapat kesulitan dalam implementasi kurikulum 2013 kemudian guru

selalu berusaha memberikan yang terbaik pada siswa agar menjadi penerus bangsa yang berguna. Hal tersebut menjadi faktor pendorong berjalannya kebijakan kurikulum 2013 dengan dipegang teguhnya tanggung jawab baik pihak Disdik maupun sekolah.

9. Struktur Birokrasi

Birokrat yang bersangkutan dengan kebijakan kurikulum 2013 adalah Pemerintah pusat yang merumuskan kebijakan dan mensosialisasikan kebijakan pada birokrat di bawahnya yaitu Dinas terkait, kemudian Dinas pendidikan yang telah mendapatkan arahan dari pusat berhak memberi pengarahan terhadap UPTD yang dibawahinya dan sekolah yang ada. Sekolah menjadi target utama karena di dalamnya terdapat siswa yang menjadi sasaran kebijakan, guru sebagai implementor.

10. Standard dan Sasaran

Standard kurikulum 2013 ini ada lima aspek yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan komunikasi di mana aspek-aspek tersebut sudah bisa diaplikasikan sesuai dengan pengertiannya dalam kegiatan belajar mengajar bertujuan agar siswa lebih aktif dalam

mengaspirasikan jawabannya. Namun masih ada beberapa murid yang pasif di dalam kelas.

11. Lingkungan (ekonomi, sosial, dan politik)

Lingkungan sangat berpengaruh bagi keberhasilan implementasi kebijakan, ekonomi tidak menjadi masalah besar karena semua pelatihan yang diberikan pada guru selama satu bulan semua sudah ditanggung Pemerintah, pengadaan buku paket telah dilakukan untuk menunjang pembelajaran siswa.

A. Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan. Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut :

a) Ketepatan Lingkungan (Eksternal)

Untuk menghindari hal negatif baik bagi Pemerintah maupun orangtua murid, penulis memberikan saran sebaiknya diadakan pengawasan terhadap media terkait penyebaran berita yang belum tentu kebenarannya yang dilakukan oleh Pemerintah pusat.

b) Ketepatan Proses

Untuk pengembangan lebih lanjut maka saran dari penulis untuk masalah ini bisa dilakukan dengan memberikan latihan lebih banyak lagi terhadap guru, pelatihan yang diberikan juga dapat membuat guru lebih kreatif dan mudah dipahami oleh murid sehingga pelajaran di dalam kelas tidak membosankan.

c) Sumberdaya Fisik (internet dan pendingin ruang kelas)

Dari beberapa permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai fasilitas kecepatan internet atau wifi dan beberapa pendingin ruangan yang kurang berfungsi, maka dari itu penulis mengajukan saran sebagai berikut:

- a. Pihak sekolah dapat menambahkan jumlah akses internet seperti wifi di beberapa titik sekolah dengan kecepatan yang lebih tinggi dari sebelumnya.
- b. Jika ada fasilitas seperti ac yang rusak pihak sekolah segera memanggil petugas atau teknisi yang bersangkutan untuk memperbaiki. Apabila

fasilitas tersebut memang sudah saatnya diperbarui diharapkan sekolah memikirkan untuk pengadaan barang baru. Karena hal seperti ini memang sepele namun sangat berpengaruh pada tingkat semangat belajar siswa dikelas,.

d) Standard dan Sasaran

Dalam kesimpulan dikatakan masih ada siswa yang jarang ikut berpartisipasi dalam pembelajaran atau pasif. Saran yang ingin diberikan dari penulis adalah melakukan pendekatan pada siswa memberikan motivasi kemudian menjadikan suasana belajar di dalam kelas tidak terlalu tegang

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwanto, Erwan dan Ratih Sulistyastuti, Dyah. (2012). **Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia.** Yogyakarta: Gava Media
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). **Kebijakan publik.** Yogyakarta: Gava Medika
- Pasolong, Harbani. (2007). **Teori Administrasi Publik.** Bandung: Alfabeta.
- Rohman, Arif. (2012). **Kebijakan Pendidikan.** Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Suwitri, Sri. (). **Konsep Dasar Kebijakan Publik.** Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Pasolong, Harbani. **Metode Penelitian Administrasi Publik.** Bandung: Alfabeta Bandung.